

INDONESIA 2045: DARI PEMULIHAN EKONOMI MENUJU KEMAKMURAN BERKELANJUTAN

Oleh

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudict.com/cv.pdf

Institut Bisnis dan Multimedia (IBM ASMI)

2026

INDONESIA 2045

DARI PEMULIHAN EKONOMI MENUJU KEMAKMURAN BERKELANJUTAN

Bersama Mewujudkan Indonesia Maju, Mandiri, dan Makmur Berkelanjutan

Transformasi menyeluruh untuk pertumbuhan tinggi, inklusif, hijau, dan berkeadilan sosial demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

PILAR UTAMA INDONESIA 2045

EKONOMI TANGGUH DAN INKLUSIF	SDM UNGGUL DAN BERKARAKTER	INOVASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL	INDUSTRIALISASI DAN HILIRISASI	EKONOMI HIJAU DAN BIRU	TATA KELOLA DAN INSTITUSI BERKELAS DUNIA	INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS MERATA	KEMITRAAN GLOBAL DAN PERAN STRATEGIS
Pertumbuhan tinggi, berkualitas, produktif, dan berdaya saing global.	Pendidikan berkualitas, kesehatan prima, dan keterampilan masa depan.	Teknologi, riset, dan inovasi mendorong produktivitas dan nilai tambah.	Mengolah sumber daya menjadi produk bernilai tinggi dan memperkuat kemandirian ekonomi.	Pembangunan rendah karbon, energi bersih, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.	Birokrasi efisien, transparan, dan berintegritas tinggi.	Infrastruktur modern, konektivitas digital dan fisik hingga ke pelosok negeri.	Indonesia berkontribusi dalam perdamaian, perdagangan, dan pembangunan dunia.

JALAR TRANSFORMASI 2025–2045

2025–2030 MEMPERKUAT FONDASI	2030–2035 AKSELERASI TRANSFORMASI	2036–2045 LONCATAN MENUJU KEMAKMURAN
Pemulihan ekonomi, stabilitas makro, reformasi struktural, dan investasi SDM.	Peningkatan produktivitas, industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.	Indonesia maju, mandiri, makmur, berkeadilan, dan berkelanjutan menjadi negara berprestasi tinggi pada 2045.

INDONESIA 2045: NEGARA MAKMUR BERKELANJUTAN

- ✓ Pendapatan per kapita tinggi
- ✓ Kelas menengah besar dan sejahtera
- ✓ Kesenjangan rendah dan inklusi tinggi
- ✓ Lingkungan lestari dan tangguh iklim
- ✓ Budaya maju dan berdaya saing
- ✓ Institusi kuat dan kepercayaan tinggi

KUNCI KEBERHASILAN

- ✓ Kepemimpinan visioner dan kolaboratif
- ✓ Inovasi dan teknologi untuk kemajuan
- ✓ Kerja keras, gotong royong, dan integritas
- ✓ Investasi pada generasi kini dan mendatang

Oleh:
Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD
www.rudyct.com/cv.pdf
IBM-ASMI
(Institut Bisnis dan Multimedia)

“ Pemulihan adalah awal, transformasi adalah kunci, kemakmuran berkelanjutan adalah tujuan kita bersama. ”

h 2

Abstrak

Artikel ini membahas perjalanan Indonesia menuju 2045 sebagai proses transisi dari pemulihan ekonomi menuju kemakmuran yang berkelanjutan. Sasaran Indonesia Emas 2045 telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045, yang menempatkan visi Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dalam kerangka ini, pemulihan ekonomi tidak cukup dipahami sebagai kembalinya pertumbuhan setelah krisis, melainkan sebagai titik awal transformasi struktural yang meningkatkan produktivitas, menciptakan pekerjaan berkualitas, memperkuat sumber daya manusia, memperbesar investasi, memperluas kelas menengah, dan sekaligus menurunkan kerentanan sosial serta ekologis. Artikel mengembangkan gagasan “Rantai Transmisi Kemakmuran 2045” yang menghubungkan stabilitas makro, produktivitas, pekerjaan bernilai tambah, pendapatan riil, pembentukan aset, layanan publik, resiliensi, dan kesejahteraan antargenerasi. Pembahasan mencakup transformasi ekonomi, industrialisasi, digitalisasi dan AI, UMKM dan koperasi, modal manusia, pangan, energi, ekonomi hijau dan biru, pembiayaan pembangunan, reformasi fiskal, tata kelola, desentralisasi, serta risiko geopolitik dan iklim. Argumen utamanya adalah bahwa Indonesia dapat mencapai status negara maju hanya jika pertumbuhan yang lebih cepat berjalan bersama kualitas institusi yang lebih baik, pemerataan kesempatan, peningkatan produktivitas yang luas, dan perlindungan terhadap modal alam. Kemakmuran 2045 dengan demikian harus dinilai bukan hanya dari besarnya PDB, tetapi dari kemampuan masyarakat menjalani kehidupan yang sehat, produktif, aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Indonesia 2045; Indonesia Emas; pemulihan ekonomi; kemakmuran berkelanjutan; transformasi struktural; produktivitas; pekerjaan berkualitas; SDM; ekonomi hijau; digitalisasi; tata kelola; RPJPN 2025-2045

1. Pendahuluan: 2045 sebagai Horizon Pembangunan

Tahun 2045 memiliki makna simbolik sekaligus strategis bagi Indonesia karena menandai satu abad kemerdekaan. Namun makna pembangunan tidak terletak pada simbol waktu, melainkan pada kualitas masyarakat dan negara yang hendak diwujudkan. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 menetapkan RPJPN 2025-2045 sebagai kerangka pembangunan jangka panjang nasional. Visi yang dibawa adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Dengan demikian, 2045 bukan sekadar slogan optimistis, tetapi horizon kebijakan yang menuntut kesinambungan lintas pemerintahan.

Perjalanan menuju 2045 berlangsung dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Perubahan teknologi, rivalitas geopolitik, fragmentasi perdagangan, perubahan iklim, transisi energi, penuaan penduduk di berbagai negara, dan perkembangan artificial intelligence akan memengaruhi struktur kesempatan Indonesia. Strategi pembangunan karena itu tidak dapat hanya mengulang formula

pertumbuhan masa lalu. Indonesia memerlukan kemampuan adaptasi, inovasi, dan pembelajaran kelembagaan.

Pemulihan ekonomi menjadi tahap awal. Krisis harus diatasi, daya beli dipulihkan, investasi dijaga, dan pekerjaan diciptakan. Tetapi setelah kondisi stabil, pertanyaan berikutnya adalah apakah ekonomi kembali pada struktur lama atau bergerak menuju struktur yang lebih produktif. Di sinilah perbedaan antara recovery dan transformation.

2. Landasan RPJPN 2025-2045

RPJPN 2025-2045 memberikan kerangka resmi untuk pembangunan dua dekade menuju Indonesia Emas. Dokumen tersebut diarahkan pada transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola yang dilaksanakan lintas wilayah dan lintas sektor. Sasaran jangka panjang tidak hanya berkaitan dengan pendapatan per kapita, tetapi juga pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan posisi Indonesia di dunia, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca.

Pendekatan ini penting karena negara maju bukan sekadar negara dengan pendapatan tinggi. Kemajuan memerlukan institusi yang efektif, kesehatan dan pendidikan bermutu, infrastruktur modern, inovasi, lingkungan hidup yang terjaga, dan kesempatan ekonomi yang dapat diakses secara luas. Pertumbuhan tanpa transformasi sosial dapat menghasilkan ketimpangan; pertumbuhan tanpa tata kelola dapat menghasilkan rente; pertumbuhan tanpa keberlanjutan dapat merusak modal alam yang dibutuhkan generasi berikutnya.

Karena itu, artikel ini membaca RPJPN sebagai kontrak pembangunan antargenerasi. Setiap kebijakan hari ini seharusnya diuji berdasarkan kontribusinya terhadap kemampuan Indonesia pada 2045.

3. Pemulihan Ekonomi sebagai Titik Berangkat

Pemulihan ekonomi memiliki fungsi stabilisasi. Rumah tangga memerlukan pendapatan, dunia usaha memerlukan permintaan dan kepastian, sedangkan negara perlu menjaga stabilitas makro. Namun pemulihan yang hanya mengembalikan output ke tren lama akan kehilangan kesempatan memperbaiki struktur ekonomi.

Kebijakan pemulihan sebaiknya memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah perlindungan: menjaga konsumsi dasar, pekerjaan, dan usaha yang layak. Lapisan kedua adalah upgrading: mengarahkan investasi pada infrastruktur, keterampilan, teknologi, dan kapasitas produksi yang meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, setiap rupiah stimulus dapat memberikan dampak jangka pendek sekaligus jangka panjang.

Prinsip build back better relevan di sini. Ekonomi pascakrisis harus menjadi lebih tangguh, lebih inklusif, dan lebih hijau daripada sebelumnya.

4. Dari Pertumbuhan Lima Persen menuju Pertumbuhan Berkualitas

World Bank mencatat Indonesia telah menjadi negara berpendapatan menengah atas sejak 2023 dan merupakan ekonomi terbesar ke-16 dunia pada 2024. Namun laporan Growth and Jobs menekankan bahwa untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada 2045, pertumbuhan harus menjadi lebih produktif dan lebih kaya pekerjaan bernilai tambah. Tantangan Indonesia bukan hanya tingkat pertumbuhan, melainkan kualitas sumber pertumbuhan.

Pertumbuhan sekitar lima persen telah memberikan stabilitas dan kemajuan sosial, tetapi target 2045 menuntut akselerasi produktivitas. Pemerintah bahkan menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang. Akselerasi yang sehat tidak dapat dibangun hanya melalui ekspansi kredit atau belanja jangka pendek. Ia memerlukan reformasi kompetisi, investasi, perdagangan, pembiayaan, keterampilan, dan kualitas institusi.

Pertumbuhan berkualitas berarti output meningkat bersamaan dengan produktivitas, upah riil, pekerjaan formal, inovasi, dan mobilitas sosial. Indikator PDB perlu dibaca bersama distribusi manfaatnya.

5. Produktivitas sebagai Mesin Kemakmuran

Dalam jangka panjang, peningkatan taraf hidup bergantung pada produktivitas. Negara menjadi lebih makmur ketika pekerja, perusahaan, dan institusi mampu menghasilkan nilai lebih tinggi dengan sumber daya yang tersedia. Produktivitas dapat meningkat melalui teknologi, pendidikan, infrastruktur, manajemen, kompetisi, inovasi, dan skala pasar.

Produktivitas Indonesia masih menghadapi tantangan difusi. Perusahaan frontier dapat menggunakan teknologi modern, tetapi banyak usaha kecil tetap berada pada produktivitas rendah. World Bank menyoroti terbatasnya penyebaran pengetahuan dan banyaknya pekerjaan bernilai tambah rendah. Artinya, agenda 2045 tidak cukup membangun champions; teknologi dan praktik manajemen harus menyebar ke basis ekonomi yang luas.

Kebijakan produktivitas perlu menggabungkan persaingan, keterbukaan, pembiayaan, standardisasi, digitalisasi, pendidikan vokasi, dan extension services bagi UMKM serta sektor pertanian.

6. Pekerjaan Berkualitas dan Kelas Menengah

Kemakmuran berkelanjutan harus tercermin pada kualitas pekerjaan. Pekerjaan yang produktif memberikan pendapatan yang memungkinkan rumah tangga membentuk tabungan, membeli rumah, berinvestasi dalam pendidikan, dan menghadapi guncangan. Tanpa pekerjaan berkualitas, pertumbuhan dapat menghasilkan kelas pekerja yang besar tetapi rentan.

Strategi menuju 2045 perlu mendorong pergeseran pekerja dari aktivitas bernilai tambah rendah ke sektor produktivitas lebih tinggi. Manufaktur modern, jasa profesional, kesehatan, pendidikan, logistik, ekonomi digital, energi bersih, industri kreatif, dan agroindustri dapat menjadi sumber pekerjaan kelas menengah.

Kelas menengah yang kuat juga penting bagi stabilitas demokrasi dan basis pajak. Masyarakat yang memiliki aset dan prospek mobilitas cenderung menuntut layanan publik berkualitas dan tata kelola yang lebih baik.

7. Modal Manusia: Pendidikan, Kesehatan, dan Gizi

Tidak ada Indonesia Emas tanpa manusia yang sehat dan berpengetahuan. Modal manusia adalah aset paling penting karena teknologi dan modal fisik tidak produktif tanpa keterampilan. Pendidikan dasar harus menjamin literasi, numerasi, karakter, dan kemampuan belajar. Pendidikan menengah dan tinggi perlu menghasilkan keterampilan yang relevan dengan perubahan teknologi.

Kesehatan dan gizi sama pentingnya. Stunting, penyakit kronis, dan akses layanan yang tidak merata mengurangi kemampuan belajar dan bekerja. Investasi kesehatan primer, pencegahan, air bersih, sanitasi, dan kualitas gizi memberikan return antargenerasi.

Agenda 2045 perlu menghubungkan pendidikan dan kesehatan dalam perspektif life-course. Anak yang sehat belajar lebih baik; pekerja terampil lebih produktif; lansia sehat mengurangi beban keluarga dan sistem kesehatan.

8. Pendidikan Tinggi dan Ekonomi Pengetahuan

Negara maju menciptakan nilai melalui pengetahuan, riset, teknologi, dan organisasi. Perguruan tinggi karena itu perlu bergerak dari lembaga pengajaran menuju ekosistem inovasi. Kualitas riset, relevansi kurikulum, kolaborasi industri, dan kemampuan komersialisasi pengetahuan menjadi semakin penting.

Indonesia memerlukan lebih banyak ilmuwan, engineer, dokter, data scientist, manajer teknologi, dan profesional kreatif. Tetapi kuantitas gelar tanpa kualitas tidak cukup. Pendidikan tinggi harus mengembangkan critical thinking, problem solving, komunikasi, etika, dan kemampuan menggunakan AI.

Hubungan universitas-industri perlu diperkuat melalui laboratorium bersama, magang, riset terapan, dan procurement inovatif. Pengetahuan yang dihasilkan kampus harus menjadi input produktivitas nasional.

9. Transformasi Digital dan Artificial Intelligence

Digitalisasi dan AI akan mengubah struktur ekonomi menuju 2045. Nilai teknologi bukan hanya pada industri digital, tetapi pada kemampuannya meningkatkan produktivitas sektor tradisional. Pertanian, manufaktur, kesehatan, pendidikan, logistik, dan administrasi publik dapat memperoleh manfaat dari data dan otomatisasi.

Namun AI juga menciptakan displacement risk. Pekerjaan rutin administratif dan kognitif dapat berubah cepat. Karena itu, strategi nasional perlu berorientasi pada augmentation: menggunakan AI untuk meningkatkan kemampuan manusia sambil membangun reskilling dan perlindungan transisi.

Data governance, keamanan siber, kompetisi platform, dan etika AI akan menjadi bagian dari infrastruktur institusional negara maju. Tanpa trust, adopsi digital tidak berkelanjutan.

10. Industrialisasi Baru

Industrialisasi tetap penting karena manufaktur menciptakan skala, ekspor, pembelajaran teknologi, dan jaringan pemasok. Namun industrialisasi 2045 tidak dapat meniru model padat tenaga kerja murah semata. Upah dan aspirasi meningkat, sementara otomatisasi semakin murah. Indonesia perlu bergerak ke manufaktur bernilai tambah, engineering, advanced materials, electronics, medical devices, kendaraan listrik, dan industri berbasis sumber daya yang terolah lebih dalam.

Hilirisasi dapat menjadi pintu masuk, tetapi harus berlanjut dari pemrosesan primer menuju inovasi dan teknologi. Keberhasilan tidak diukur hanya dari jumlah smelter, tetapi dari kompleksitas produk, local capability, ekspor bernilai tambah, dan keterhubungan dengan pemasok domestik.

Industrial policy perlu berbasis kinerja, transparansi, dan sunset clause agar dukungan tidak berubah menjadi rente permanen.

11. UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Lokal

Sebagian besar kegiatan ekonomi masyarakat berlangsung melalui UMKM dan usaha lokal. Karena itu, kemakmuran 2045 tidak akan inklusif jika hanya perusahaan besar yang naik produktivitas. UMKM perlu memperoleh akses teknologi, pembiayaan, manajemen, logistik, standardisasi, dan pasar.

Koperasi dapat berperan sebagai agregator. Petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil dapat menggabungkan pembelian input, pengolahan, pemasaran, dan pembiayaan. Model koperasi modern perlu memanfaatkan digitalisasi dan governance profesional.

Tujuan akhirnya bukan mempertahankan usaha tetap kecil, tetapi memberikan jalur naik kelas. Program pemerintah harus diukur dari produktivitas, omzet, formalitas, ekspor, dan penciptaan pekerjaan.

12. Transformasi Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan bagian mendasar kemakmuran. Pertanian Indonesia perlu meningkatkan produktivitas tanpa merusak tanah, air, dan biodiversitas. Teknologi benih, mekanisasi, irigasi presisi, data cuaca, penyuluhan digital, dan pascapanen dapat memperbesar hasil.

Transformasi pertanian juga membutuhkan konsolidasi layanan meskipun kepemilikan lahan tetap tersebar. Koperasi, contract farming yang adil, dan machinery service dapat menghasilkan skala ekonomi.

Ketahanan pangan bukan berarti seluruh produk harus diproduksi domestik. Strategi yang sehat menyeimbangkan produksi, diversifikasi, cadangan, perdagangan, dan ketahanan rantai pasok.

13. Ekonomi Maritim dan Biru

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang besar: perikanan, aquaculture, pelabuhan, logistik, wisata bahari, bioteknologi laut, dan energi laut. Namun eksploitasi berlebihan akan menghancurkan sumber daya yang menjadi dasar ekonomi.

Ekonomi biru mengharuskan stok ikan, terumbu karang, mangrove, dan kualitas perairan diperlakukan sebagai modal produktif. Pengelolaan berbasis science, traceability, kawasan konservasi, dan penegakan hukum diperlukan.

Nilai tambah juga perlu ditingkatkan melalui cold chain, pengolahan, sertifikasi, dan branding. Kemakmuran pesisir bergantung pada kemampuan masyarakat lokal memperoleh bagian yang adil dari nilai ekonomi laut.

14. Transisi Energi dan Keamanan Pasokan

Energi menentukan biaya produksi dan kualitas hidup. Indonesia perlu menyediakan energi yang terjangkau sekaligus menurunkan intensitas karbon. Transisi harus dilakukan secara bertahap dan terencana agar keamanan sistem tidak terganggu.

Investasi energi terbarukan, jaringan, storage, efisiensi, dan elektrifikasi transportasi membuka peluang industri baru. Namun transisi juga memengaruhi pekerja dan daerah yang bergantung pada batubara atau industri intensif karbon. Just transition memerlukan diversifikasi ekonomi dan reskilling.

Keamanan energi 2045 berarti memiliki portofolio yang beragam, jaringan yang tangguh, dan ketergantungan eksternal yang dapat dikelola.

15. Ekonomi Hijau dan Batas Ekologis

Kemakmuran berkelanjutan tidak dapat dibangun dengan menghabiskan modal alam. Hutan, tanah, air, udara, biodiversitas, dan iklim menyediakan layanan ekosistem yang menopang ekonomi. Kerusakan lingkungan menciptakan biaya melalui bencana, penyakit, penurunan produktivitas, dan konflik sumber daya.

Konsep planetary boundaries mengingatkan bahwa pembangunan berlangsung dalam batas ekologis. Bagi Indonesia, perlindungan hutan, restorasi lahan, konservasi biodiversitas, pengendalian polusi, dan adaptasi iklim harus menjadi bagian dari strategi ekonomi.

Ekonomi hijau juga menciptakan pasar baru: energi bersih, efisiensi, circular economy, transportasi publik, konstruksi hijau, dan jasa lingkungan. Environmental regulation dapat mendorong inovasi jika dirancang konsisten.

16. Perubahan Iklim dan Resiliensi

Indonesia rentan terhadap banjir, kekeringan, kenaikan muka laut, kebakaran, dan cuaca ekstrem. Perubahan iklim dapat memengaruhi pangan, kesehatan, infrastruktur, dan produktivitas. Karena itu, adaptasi adalah investasi ekonomi.

Kota memerlukan drainage, ruang hijau, tata ruang, dan infrastruktur tahan iklim. Pertanian memerlukan varietas adaptif dan pengelolaan air. Pesisir memerlukan mangrove, perlindungan pantai, dan perencanaan relokasi pada wilayah berisiko tinggi.

Resiliensi juga mencakup pembiayaan risiko. Anggaran kontinjensi, asuransi bencana, dan data risiko dapat mempercepat pemulihan tanpa mengganggu fiskal.

17. Infrastruktur sebagai Platform Produktivitas

Infrastruktur bukan tujuan, melainkan platform produktivitas. Jalan, pelabuhan, listrik, air bersih, transportasi publik, dan broadband mengurangi biaya dan memperbesar akses. Tetapi manfaat tergantung lokasi, desain, dan konektivitas antarjaringan.

Ke depan, Indonesia perlu lebih menekankan kualitas dan pemeliharaan. Proyek baru yang tidak dipelihara menghasilkan depresiasi aset. Public investment management harus memasukkan appraisal, life-cycle cost, dan evaluasi pascaproyek.

Infrastruktur juga harus mendukung pola wilayah yang seimbang. Konektivitas antarpulau dan pusat pertumbuhan baru dapat mengurangi konsentrasi ekonomi.

18. Urbanisasi dan Kota Produktif

Urbanisasi dapat meningkatkan produktivitas melalui agglomeration economies, tetapi hanya jika kota dikelola baik. Kemacetan, polusi, harga rumah, banjir, dan transportasi buruk dapat menghilangkan manfaat aglomerasi.

Kota 2045 memerlukan transit-oriented development, hunian terjangkau, ruang publik, air dan sanitasi, serta digital city management. Produktivitas kota harus dibaca bersama kualitas hidup.

Kota sekunder juga perlu diperkuat agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di metropolitan besar. Jaringan kota yang saling terhubung dapat mendistribusikan kesempatan ekonomi.

19. Desa sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Desa tidak harus menjadi wilayah yang hanya memasok tenaga kerja ke kota. Infrastruktur digital, jalan, energi, dan logistik dapat memungkinkan agroindustri, wisata, jasa, dan ekonomi kreatif berkembang di daerah.

Strategi desa perlu berbasis keunggulan lokal. Tidak semua desa harus memiliki jenis usaha yang sama. Data potensi dan keterlibatan masyarakat penting untuk memilih investasi.

Kemakmuran lokal muncul ketika nilai tambah tinggal lebih lama di wilayah melalui pengolahan, pemasaran, koperasi, dan jasa pendukung.

20. Konektivitas Nusantara dan Pemerataan Wilayah

Ketimpangan wilayah merupakan tantangan mendasar negara kepulauan. Biaya transportasi dan akses layanan berbeda tajam antarwilayah. Konektivitas fisik dan digital dapat memperkecil economic distance.

Namun pemerataan bukan berarti semua daerah harus memiliki struktur ekonomi yang identik. Kebijakan perlu mengembangkan comparative advantage dan pusat pertumbuhan yang saling melengkapi.

Transfer fiskal, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus memastikan standar minimum nasional, sementara ruang inovasi daerah tetap dipertahankan.

21. Reformasi Fiskal dan Ruang Pembangunan

Ambisi 2045 memerlukan pembiayaan besar. Negara harus memperkuat penerimaan tanpa menghambat investasi. Basis pajak yang luas, kepatuhan, digitalisasi administrasi, dan pengurangan tax expenditure yang tidak efektif dapat memperbesar ruang fiskal.

Belanja juga perlu direprioritaskan. Program dengan return sosial tinggi pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, riset, dan perlindungan sosial harus memperoleh prioritas.

Utang dapat menjadi instrumen pembangunan jika digunakan untuk aset produktif dan dikelola prudent. Kredibilitas fiskal merupakan modal yang harus dijaga agar negara memiliki ruang merespons krisis.

22. Mobilisasi Modal Swasta

Kebutuhan investasi jauh lebih besar daripada kemampuan anggaran pemerintah. World Bank dalam kemitraan 2026-2030 dengan Indonesia menekankan mobilisasi investasi swasta dan penciptaan pekerjaan produktif sebagai bagian penting menuju 2045.

Modal swasta memerlukan kepastian regulasi, rule of law, kompetisi, akses pembiayaan, dan pipeline proyek yang bankable. Public-private partnership dapat membantu infrastruktur, tetapi risiko perlu dibagi secara transparan.

Deepening pasar keuangan, kredit UMKM, pembiayaan hijau, venture capital, dan institutional investors akan menjadi sumber investasi jangka panjang.

23. Reformasi Regulasi dan Kompetisi

Produktivitas tumbuh ketika perusahaan memiliki insentif untuk berinovasi. Pasar yang terlalu terkonsentrasi atau regulasi yang sulit diprediksi mengurangi entry dan investasi. World Bank

menempatkan kompetisi dan pengurangan hambatan regulasi sebagai bagian penting agenda pertumbuhan.

Reformasi harus mengurangi discretionary barriers, mempercepat perizinan, dan memastikan level playing field. Peran negara sebagai regulator, pemilik usaha, dan pembeli harus dipisahkan secara jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Kompetisi bukan tujuan ideologis; ia adalah mekanisme untuk menekan biaya, meningkatkan pilihan, dan memaksa peningkatan produktivitas.

24. Perdagangan dan Integrasi Global

Indonesia perlu mempertahankan keterbukaan strategis. Ekspor memungkinkan perusahaan mencapai skala lebih besar dan belajar dari pasar global. Impor teknologi dan intermediate goods dapat meningkatkan produktivitas.

Namun integrasi global menghadapi fragmentasi geopolitik. Strategi perlu mendiversifikasi pasar, pemasok, dan mitra investasi. Indonesia dapat memanfaatkan posisi ASEAN dan Indo-Pasifik untuk menjadi hub produksi dan jasa.

Trade policy sebaiknya mendukung upgrading, bukan proteksi permanen. Dukungan sementara harus memiliki target kinerja yang jelas.

25. Hilirisasi dan Diversifikasi

Hilirisasi sumber daya merupakan strategi meningkatkan nilai tambah domestik. Namun ketergantungan baru pada sedikit komoditas olahan tetap berisiko. Indonesia harus bergerak dari hilirisasi menuju diversifikasi.

Kompleksitas ekonomi meningkat ketika kemampuan dari satu industri dapat digunakan pada industri lain. Ekosistem baterai, misalnya, dapat melahirkan kemampuan kimia, material, engineering, software, dan recycling.

Kebijakan perlu mengukur spillover teknologi, supplier development, keterampilan, dan inovasi; bukan hanya nilai investasi.

26. Inovasi, Riset, dan Teknologi

Indonesia 2045 perlu menjadi produsen pengetahuan. Belanja riset, kualitas laboratorium, intellectual property, dan hubungan universitas-industri harus diperkuat.

Inovasi memerlukan toleransi terhadap eksperimen. Tidak semua riset menghasilkan komersialisasi, tetapi sistem harus mampu belajar. Competitive grants, mission-oriented research, dan procurement dapat menciptakan demand inovasi.

Bidang prioritas dapat mencakup pangan, kesehatan tropis, biodiversitas, teknologi maritim, energi, material, AI bahasa Indonesia, dan climate technology.

27. Tata Kelola dan Kualitas Institusi

Institusi menentukan apakah kebijakan dapat dilaksanakan. Negara dengan birokrasi efektif mampu mengumpulkan pajak, menyediakan layanan, menegakkan aturan, dan mengelola proyek. Korupsi dan ketidakpastian regulasi menaikkan biaya ekonomi.

Transformasi tata kelola perlu menggabungkan meritocracy, digital government, data, evaluasi, dan transparansi. Namun digitalisasi tidak menggantikan integritas.

Kualitas institusi juga mencakup kemampuan koordinasi lintas kementerian dan pusat-daerah. Tantangan 2045 bersifat lintas sektor sehingga silo birokrasi harus dikurangi.

28. Demokrasi, Partisipasi, dan Kontrak Sosial

Kemakmuran berkelanjutan memerlukan legitimasi. Masyarakat harus melihat bahwa pajak digunakan secara adil, peluang tidak hanya dinikmati elite, dan kebijakan dapat dikoreksi melalui institusi.

Partisipasi publik meningkatkan kualitas informasi dan penerimaan kebijakan, terutama pada isu tata ruang, energi, dan lingkungan. Namun partisipasi perlu substantif, bukan ritual.

Kontrak sosial 2045 adalah hubungan timbal balik: warga berkontribusi dan mematuhi aturan; negara menyediakan layanan, keadilan, dan kesempatan.

29. Perlindungan Sosial sebagai Infrastruktur Resiliensi

Negara maju memerlukan sistem perlindungan sosial yang mencegah guncangan berubah menjadi kemiskinan permanen. Bantuan sosial, jaminan kesehatan, pensiun, dan perlindungan pengangguran perlu berkembang mengikuti perubahan pasar kerja.

Sistem harus portable karena pekerja semakin sering berpindah status formal, informal, dan platform. Data sosial-ekonomi yang akurat dapat meningkatkan ketepatan sasaran.

Perlindungan sosial juga mendukung transformasi. Pekerja lebih berani berpindah sektor atau mengikuti pelatihan jika memiliki safety net.

30. Demografi dan Bonus yang Tidak Otomatis

Bonus demografi memberikan peluang ketika proporsi usia kerja tinggi, tetapi manfaatnya tidak otomatis. Tanpa pekerjaan produktif dan keterampilan, populasi besar dapat menambah tekanan sosial.

Indonesia harus memanfaatkan dua dekade sebelum struktur usia semakin menua untuk memperbesar produktivitas dan tabungan. Partisipasi perempuan, kesehatan reproduksi, childcare, dan kualitas pendidikan berperan penting.

Persiapan ageing society juga harus dimulai: sistem pensiun, kesehatan lansia, kota ramah usia, dan produktivitas sepanjang hayat.

31. Kesenjangan Gender dan Inklusi

Kemakmuran nasional tidak optimal ketika sebagian penduduk menghadapi hambatan sistematis. Peningkatan partisipasi ekonomi perempuan dapat memperbesar basis talenta dan pendapatan rumah tangga.

Kebijakan childcare, transportasi aman, perlindungan terhadap diskriminasi, akses pembiayaan, dan fleksibilitas kerja dapat membantu. Penyandang disabilitas juga membutuhkan aksesibilitas fisik dan digital.

Inklusi bukan hanya kebijakan sosial; ia merupakan strategi produktivitas karena memperluas pemanfaatan modal manusia.

32. Budaya, Modal Sosial, dan Karakter Pembangunan

Pembangunan tidak hanya ditentukan modal fisik dan manusia, tetapi juga modal sosial: kepercayaan, norma kerja sama, dan kemampuan komunitas menyelesaikan masalah. Tradisi gotong royong dan bentuk lokal seperti mapalus menunjukkan bahwa kerja kolektif memiliki akar kuat.

Modernisasi tidak harus menghapus nilai tersebut. Digital platform dan koperasi dapat memperbarui cara komunitas berkolaborasi.

Karakter produktif—disiplin, integritas, rasa ingin tahu, dan tanggung jawab—menjadi semakin penting ketika ekonomi berbasis pengetahuan membutuhkan self-management.

33. Geopolitik dan Ketahanan Ekonomi

Persaingan Amerika Serikat-Tiongkok, konflik regional, dan perubahan rantai pasok menciptakan peluang sekaligus risiko. Indonesia perlu menjaga strategic autonomy sambil mempertahankan keterbukaan.

Ketahanan ekonomi berarti memiliki diversifikasi pasar, cadangan strategis, sistem pembayaran yang tangguh, dan kapasitas domestik pada sektor kritis. Tetapi self-sufficiency total tidak efisien.

Diplomasi ekonomi harus memperluas investasi, transfer teknologi, dan pasar ekspor sambil melindungi kepentingan nasional.

34. Rantai Transmisi Kemakmuran 2045

Artikel ini mengusulkan Rantai Transmisi Kemakmuran 2045: stabilitas -> investasi dan inovasi -> produktivitas -> pekerjaan berkualitas -> pendapatan riil -> pembentukan aset -> layanan publik dan perlindungan -> resiliensi -> kemakmuran antargenerasi. Setiap tahap saling terkait.

Stabilitas tanpa investasi menghasilkan stagnasi. Investasi tanpa produktivitas menghasilkan pertumbuhan mahal. Produktivitas tanpa pekerjaan dan distribusi menghasilkan ketimpangan.

Pendapatan tanpa pembentukan aset menghasilkan kerentanan. Aset tanpa perlindungan dapat hilang ketika terjadi krisis.

Kerangka ini membantu menggeser fokus dari indikator tunggal ke sistem kesejahteraan yang utuh.

35. Sustainable Prosperity Scorecard

Untuk mengukur kemajuan, artikel mengusulkan Sustainable Prosperity Scorecard dengan delapan dimensi: pendapatan dan produktivitas; pekerjaan; modal manusia; pemerataan; kualitas institusi; infrastruktur dan digital; resiliensi; serta modal alam.

Pendapatan per kapita tetap penting, tetapi harus disertai produktivitas tenaga kerja dan upah riil. Pekerjaan diukur dari formalitas, kualitas, dan mobilitas. Modal manusia mencakup pendidikan dan kesehatan. Pemerataan mencakup kemiskinan, ketimpangan, wilayah, gender, dan akses.

Resiliensi mengukur kemampuan menghadapi krisis. Modal alam mengukur apakah pertumbuhan mengurangi atau menambah ecological debt. Scorecard mencegah keberhasilan semu pada satu dimensi dengan mengorbankan dimensi lain.

36. Roadmap 2025-2029: Memperkuat Fondasi

Lima tahun pertama sangat menentukan karena menciptakan trajectory. Prioritas harus memperkuat stabilitas, modal manusia, iklim investasi, produktivitas, pangan, energi, dan kualitas institusi.

Program dengan dampak jangka pendek perlu dihubungkan dengan transformasi. Dukungan konsumsi harus membantu rumah tangga bertahan, tetapi investasi publik dan reformasi harus menciptakan kapasitas baru.

Keberhasilan periode ini sebaiknya diukur dari apakah pertumbuhan mulai lebih job-rich, investasi swasta meningkat, learning outcomes membaik, dan reformasi regulasi menghasilkan kompetisi yang lebih sehat.

37. Roadmap 2030-2034: Akselerasi Produktivitas

Pada tahap kedua, hasil reformasi fondasi harus diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas yang lebih cepat. Industri dan jasa modern perlu memperluas pangsa, sementara UMKM dan pertanian naik kelas.

Digitalisasi dan AI akan semakin matang. Indonesia perlu memastikan tenaga kerja tidak tertinggal melalui pembelajaran sepanjang hayat.

Investasi hijau, transportasi publik, energi bersih, dan adaptasi iklim harus bergerak ke skala besar.

38. Roadmap 2035-2039: Ekonomi Berbasis Inovasi

Tahap ketiga perlu memperkuat pergeseran dari adoption menuju innovation. Perusahaan domestik harus semakin mampu menciptakan teknologi, merek, intellectual property, dan jaringan global.

Universitas dan pusat riset harus menjadi bagian inti ekonomi. Venture capital, pasar modal, dan institutional investors mendukung perusahaan inovatif.

Produktivitas tinggi memungkinkan upah dan standar lingkungan meningkat bersamaan.

39. Roadmap 2040-2045: Konsolidasi Negara Maju

Tahap akhir adalah konsolidasi. Indonesia tidak hanya harus mencapai ambang pendapatan tinggi, tetapi mempertahankan institusi dan produktivitas yang mampu menjaga status tersebut.

Fokus bergeser pada kualitas hidup, ageing society, inovasi frontier, dan kepemimpinan global. Sistem perlindungan, kesehatan, dan pensiun perlu siap menghadapi populasi yang lebih tua.

Kemajuan harus tercermin pada kepercayaan publik, kota layak huni, lingkungan yang pulih, dan kesempatan antargenerasi.

40. Risiko Kegagalan: Middle-Income Trap

Risiko terbesar adalah terjebak pada pertumbuhan moderat dengan produktivitas stagnan. Middle-income trap dapat muncul ketika upah meningkat tetapi kemampuan teknologi dan institusi tidak mengikuti.

Gejalanya termasuk investasi rendah kualitas, proteksi berlebihan, pendidikan lemah, inovasi kecil, dan pasar yang tidak kompetitif. Negara menjadi terlalu mahal untuk bersaing dengan ekonomi berupah rendah tetapi belum cukup produktif untuk bersaing dengan negara maju.

Keluar dari perangkap memerlukan transformasi simultan pada perusahaan, pekerja, dan institusi.

41. Risiko Ketimpangan dan Fragmentasi Sosial

Pertumbuhan yang cepat tetapi terkonsentrasi dapat memperlemah kohesi. Kesenjangan kota-deso, Jawa-luar Jawa, digital-nondigital, dan skilled-unskilled perlu dikelola.

Redistribusi melalui pajak dan transfer penting, tetapi lebih fundamental adalah predistribution: memastikan akses pendidikan, kesehatan, modal, dan pasar sejak awal.

Kemakmuran yang dibagi secara luas memperkuat legitimasi reformasi.

42. Risiko Fiskal dan Pembiayaan

Ambisi investasi besar dapat menimbulkan risiko fiskal jika proyek tidak produktif. Off-budget liabilities, kewajiban BUMN, dan PPP perlu transparan.

Setiap proyek seharusnya diuji berdasarkan social return dan kemampuan pemeliharaan. Pembiayaan jangka panjang harus sejalan dengan umur aset.

Fiskal yang sehat bukan hambatan pembangunan; ia menjaga kemampuan negara bertindak ketika krisis.

43. Risiko Ekologis

Kerusakan hutan, tanah, air, dan pesisir dapat mengurangi PDB potensial sekaligus meningkatkan konflik. Natural capital accounting perlu masuk ke keputusan investasi.

Proyek yang tampak menguntungkan secara finansial dapat merugikan jika biaya lingkungan tidak dihitung. Strategic environmental assessment harus menjadi bagian awal perencanaan.

Kemakmuran 2045 harus meninggalkan modal alam yang cukup bagi generasi berikutnya.

44. Kepemimpinan dan Konsistensi Kebijakan

RPJPN berlangsung melintasi beberapa pemerintahan. Karena itu, konsistensi kebijakan menjadi kunci. Konsistensi bukan berarti tidak boleh mengubah program, tetapi tujuan jangka panjang harus tetap dijaga.

Institusi perencanaan, evaluasi, statistik, dan audit perlu melindungi kesinambungan. Kebijakan harus dapat dikoreksi berdasarkan bukti tanpa kehilangan arah.

Kepemimpinan 2045 adalah kemampuan menyatukan horizon politik jangka pendek dengan kepentingan pembangunan jangka panjang.

45. Ilustrasi Naratif: Dari Rumah Tangga 2026 ke Rumah Tangga 2045

Bayangkan sebuah rumah tangga muda pada 2026. Pendapatannya berasal dari usaha kecil dan pekerjaan administrasi. Mereka rentan terhadap biaya kesehatan dan kenaikan harga. Jika transformasi 2045 berhasil, perjalanan dua dekade berikutnya mengubah pilihan hidup mereka.

Usaha kecil memperoleh pembiayaan, digitalisasi, dan akses pasar hingga menjadi perusahaan menengah. Pekerja mengikuti upskilling dan beralih ke pekerjaan analitik yang menggunakan AI. Anak memperoleh pendidikan berkualitas dan masuk sektor teknologi kesehatan. Transportasi publik mengurangi biaya perjalanan, layanan kesehatan mencegah penyakit kronis, dan sistem jaminan sosial memberikan keamanan.

Pada 2045 keluarga tersebut bukan hanya berpendapatan lebih tinggi. Mereka memiliki rumah, tabungan, keterampilan, kesehatan, dan kemampuan menghadapi krisis. Itulah makna kemakmuran berkelanjutan pada tingkat mikro.

46. Agenda Manajemen: Dari Visi ke Eksekusi

Visi hanya memiliki nilai jika dapat dieksekusi. Manajemen pembangunan memerlukan prioritas, target, indikator, ownership, anggaran, dan review. Setiap program harus memiliki theory of change.

KPI tidak boleh hanya mengukur output administratif. Pembangunan industri dinilai dari produktivitas dan nilai tambah; pendidikan dari learning outcomes; kesehatan dari healthy life expectancy; infrastruktur dari biaya dan akses.

Execution discipline harus disertai learning discipline. Program yang gagal perlu dihentikan atau didesain ulang, bukan dipertahankan karena inertia.

47. Peran Dunia Usaha

Perusahaan adalah mesin investasi, inovasi, dan pekerjaan. Dunia usaha perlu melihat 2045 sebagai peluang membangun capability jangka panjang, bukan sekadar mengejar keuntungan kuartalan.

Corporate strategy dapat menggabungkan produktivitas, pengembangan pekerja, supplier upgrading, efisiensi energi, dan inovasi. ESG yang substantif dapat menjadi bagian risk management.

Perusahaan besar juga memiliki peran dalam difusi kemampuan melalui rantai pemasok, magang, dan kolaborasi riset.

48. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi harus menghasilkan lulusan yang mampu hidup di dunia yang belum sepenuhnya dapat diprediksi. Kurikulum perlu menekankan learning agility, critical thinking, digital literacy, sustainability, dan integritas.

Riset harus menjawab masalah Indonesia sekaligus memenuhi standar global. Universitas dapat menjadi neutral platform bagi pemerintah, industri, dan masyarakat.

Pendidikan manajemen khususnya perlu membekali calon pemimpin dengan kemampuan memahami teknologi, manusia, ekonomi, dan etika secara terintegrasi.

49. Peran Masyarakat Sipil dan Komunitas

Masyarakat sipil membantu memastikan pembangunan tidak kehilangan perspektif manusia.

Organisasi komunitas dapat mengidentifikasi kebutuhan lokal, mengawasi layanan, dan mendukung kelompok rentan.

Partisipasi juga meningkatkan kualitas data. Banyak masalah pembangunan tidak terlihat dari statistik nasional tanpa pengalaman warga.

Kemakmuran yang berkelanjutan memerlukan co-production antara negara dan masyarakat.

49.1. Dari Recovery Economics ke Transformation Economics

Pemulihan ekonomi pada dasarnya bekerja dalam horizon pendek: mengembalikan konsumsi, investasi, produksi, dan kepercayaan setelah guncangan. Namun strategi 2045 memerlukan transformation economics, yaitu kebijakan yang mengubah kemampuan produktif suatu negara. Perbedaan ini penting karena stimulus dapat berhasil mendorong permintaan tanpa mengubah struktur pekerjaan atau teknologi. Sebaliknya, investasi pada pendidikan, logistik, digitalisasi, riset, dan reformasi regulasi dapat memiliki dampak yang lebih lambat tetapi menentukan kemampuan ekonomi tumbuh lebih cepat dalam jangka panjang.

Transformation economics menuntut konsistensi. Negara tidak cukup memiliki banyak proyek transformasi yang berdiri sendiri. Keterkaitan antarproyek menentukan hasil akhir. Jalan tol tanpa kawasan produktif, sekolah vokasi tanpa industri yang menyerap lulusan, hilirisasi tanpa supplier domestik, atau digitalisasi tanpa keterampilan hanya menghasilkan manfaat parsial. Karena itu, kebijakan pembangunan harus dikelola sebagai portfolio of capabilities.

Dalam konteks manajemen, transformasi juga membutuhkan sequencing. Reformasi yang meningkatkan kompetisi sebaiknya diikuti akses pembiayaan dan keterampilan agar perusahaan lokal mampu merespons. Investasi energi bersih perlu diikuti pengembangan jaringan dan penyimpanan. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya benar secara individual, tetapi kompatibel ketika dijalankan bersama.

49.2. Produktivitas Perusahaan dan Difusi Pengetahuan

Perbedaan produktivitas antarpelaku usaha merupakan salah satu sumber utama ketimpangan ekonomi. Sebagian kecil perusahaan mampu menggunakan mesin modern, perangkat lunak, data, dan manajemen profesional, sementara sebagian besar usaha kecil beroperasi dengan teknologi sederhana. Jika kondisi ini bertahan, rata-rata produktivitas nasional sulit meningkat cepat.

Difusi pengetahuan karena itu perlu menjadi agenda eksplisit. Pemerintah dapat memperkuat extension services untuk manufaktur dan UMKM sebagaimana penyuluhan digunakan di pertanian. Universitas dan politeknik dapat menjadi pusat pendampingan teknologi. Perusahaan besar dapat diberikan insentif untuk mengembangkan pemasok lokal berdasarkan capaian kualitas, bukan sekadar kewajiban formal.

Manajemen juga merupakan teknologi. Perencanaan produksi, pengendalian mutu, inventory management, pemasaran, dan human-resource practices yang baik dapat meningkatkan produktivitas tanpa investasi mesin yang sangat besar. Karena itu, transformasi produktivitas 2045 harus mencakup management upgrading.

49.3. Upah Riil dan Distribusi Hasil Produktivitas

Peningkatan produktivitas penting, tetapi tujuan sosialnya baru tercapai ketika manfaat diterjemahkan ke dalam pendapatan riil dan kualitas hidup. Hubungan antara produktivitas dan upah dipengaruhi struktur pasar tenaga kerja, posisi tawar pekerja, kompetisi perusahaan, dan kebijakan upah.

Jika perusahaan memperoleh productivity gain sementara upah stagnan, konsumsi rumah tangga dan pembentukan kelas menengah tumbuh lebih lambat. Sebaliknya, kenaikan upah yang jauh melampaui produktivitas dapat mengurangi daya saing. Tantangan manajemen ekonomi adalah menjaga hubungan yang sehat antara keduanya.

Kebijakan peningkatan keterampilan, mobilitas pekerja, informasi pasar kerja, perlindungan hak, dan kompetisi membantu memastikan pekerja memperoleh bagian wajar dari nilai tambah. Dengan demikian, produktivitas menjadi fondasi kemakmuran bersama, bukan hanya profitabilitas.

49.4. Pembentukan Aset Rumah Tangga

Pendapatan tinggi tidak selalu menghasilkan ketahanan jika rumah tangga tidak memiliki aset. Kemakmuran berkelanjutan memerlukan kemampuan mengubah pendapatan menjadi tabungan, rumah, pendidikan, usaha, dana pensiun, dan perlindungan kesehatan. Aset tersebut memungkinkan keluarga menghadapi guncangan tanpa jatuh kembali ke kemiskinan.

Kebijakan perumahan, inklusi keuangan, pensiun, dan pembiayaan pendidikan berperan dalam pembentukan aset. Namun akses kredit perlu disertai responsible lending agar tidak berubah menjadi over-indebtedness. Literasi keuangan juga penting di tengah kemudahan pinjaman digital.

Indikator 2045 sebaiknya memperhatikan household balance sheet, bukan hanya income. Kelas menengah yang memiliki pendapatan tetapi tidak memiliki aset akan tetap rentan terhadap PHK, penyakit, atau krisis ekonomi.

49.5. Reformasi Perumahan dan Kota Layak Huni

Perumahan merupakan salah satu pengeluaran terbesar rumah tangga perkotaan. Jika harga rumah dan sewa tumbuh jauh lebih cepat daripada pendapatan, kenaikan upah nominal tidak banyak meningkatkan taraf hidup. Karena itu, produktivitas kota harus dihubungkan dengan housing policy.

Pemerintah perlu memperbaiki tata ruang, penyediaan lahan, transportasi publik, kepastian izin, dan pembiayaan perumahan. Transit-oriented development dapat mengurangi trade-off antara lokasi dan keterjangkauan. Rumah yang lebih murah tetapi sangat jauh dari tempat kerja menciptakan biaya waktu dan transportasi tinggi.

Kota yang makmur bukan kota dengan gedung tertinggi, tetapi kota tempat pekerja dapat tinggal dekat kesempatan ekonomi, memperoleh layanan dasar, dan memiliki ruang publik yang sehat.

49.6. Kesehatan Produktif dan Healthy Life Expectancy

Kemajuan ekonomi harus tercermin pada usia hidup sehat, bukan hanya harapan hidup. Penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung akan menjadi semakin penting ketika pendapatan meningkat dan populasi menua.

Sistem kesehatan perlu bergeser dari pola kuratif menuju pencegahan. Primary care, screening, aktivitas fisik, gizi, kualitas udara, dan desain kota dapat mengurangi beban penyakit. Digital health dapat membantu monitoring, tetapi hubungan dokter-pasien dan evidence-based policy tetap fundamental.

Healthy workforce meningkatkan produktivitas dan mengurangi absenteeism. Karena itu, kesehatan adalah investasi ekonomi sekaligus tujuan pembangunan.

49.7. Learning Poverty dan Kualitas Pendidikan

Peningkatan lama sekolah tidak selalu berarti peningkatan pembelajaran. Tantangan utama pendidikan adalah memastikan setiap siswa benar-benar mampu membaca, memahami, berhitung, dan memecahkan masalah. Learning poverty yang tinggi akan menjadi hambatan produktivitas dua dekade kemudian.

Kualitas guru merupakan faktor sentral. Sistem rekrutmen, pelatihan, coaching, asesmen, dan career path perlu mendorong professional growth. Teknologi dapat membantu, tetapi tidak menggantikan interaksi pedagogis.

Pada level menengah, kurikulum perlu menggabungkan STEM, bahasa, kemampuan sosial, kewirausahaan, dan digital literacy. Pendidikan yang adaptif membentuk manusia yang mampu berpindah pekerjaan beberapa kali sepanjang hidup.

49.8. Pendidikan Vokasi dan Link-and-Match yang Dinamis

Konsep link-and-match sering dipahami terlalu statis seolah pendidikan hanya perlu memenuhi permintaan perusahaan saat ini. Padahal 2045 membutuhkan kemampuan mengantisipasi pekerjaan yang belum ada. Pendidikan vokasi perlu mengajarkan technical foundation sekaligus adaptability.

Keterlibatan industri tetap penting. Perusahaan dapat membantu curriculum design, menyediakan peralatan, instruktur tamu, magang, dan sertifikasi. Namun perguruan tinggi dan sekolah juga harus mempertahankan kemampuan berpikir kritis agar lulusan tidak terlalu sempit.

Sistem informasi pasar kerja berbasis data dapat membantu mengidentifikasi skill shortage dan wage premium. Informasi tersebut dapat digunakan siswa, institusi pendidikan, dan pemerintah untuk pengambilan keputusan.

49.9. Riset Berbasis Misi Nasional

Negara-negara maju sering menggunakan mission-oriented innovation untuk mengarahkan kemampuan riset pada masalah besar. Indonesia dapat mengembangkan misi pada ketahanan pangan tropis, kesehatan, biodiversitas, energi kepulauan, pengelolaan laut, AI bahasa lokal, dan teknologi mitigasi bencana.

Misi berbeda dengan proyek biasa. Ia membutuhkan tujuan terukur tetapi memberi ruang eksperimen pada banyak pendekatan. Pemerintah dapat menggunakan grant, procurement, dan regulasi sebagai instrumen.

Keuntungan misi adalah terciptanya spillover pengetahuan lintas sektor. Penelitian baterai misalnya dapat menghasilkan kemampuan material, kimia, digital control, dan recycling yang berguna untuk industri lain.

49.10. Ekosistem Startup dan Scale-Up

Indonesia telah memiliki ekosistem startup yang dinamis, tetapi 2045 membutuhkan lebih banyak perusahaan yang mampu scale-up dan bersaing global. Tantangan setelah tahap awal bukan hanya pendanaan, tetapi governance, talent, product-market fit, dan akses pasar.

Kebijakan sebaiknya tidak hanya mengejar jumlah startup, melainkan kualitas perusahaan yang bertahan, mengeksport, dan menciptakan pekerjaan produktif. Pasar modal dan private equity dapat memberikan jalur pembiayaan setelah venture capital.

Hubungan startup dengan perusahaan besar dan pemerintah dapat diperkuat melalui open innovation dan procurement. Dengan demikian, inovasi tidak terisolasi dari ekonomi riil.

49.11. BUMN dan Efisiensi Modal Negara

BUMN memiliki peran penting pada infrastruktur dan sektor strategis, tetapi modal negara memiliki opportunity cost. Setiap investasi pada BUMN harus dibandingkan dengan alternatif penggunaan dana pada pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur lain.

Governance BUMN perlu menyeimbangkan mandat komersial dan penugasan publik. Penugasan harus transparan dan dikompensasi secara jelas agar kinerja dapat diukur.

BUMN juga dapat menjadi anchor buyer bagi inovasi dan pemasok domestik, tetapi prosesnya perlu kompetitif agar tidak menciptakan ketergantungan atau rente.

49.12. Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Sebagian besar kualitas hidup warga ditentukan layanan pemerintah daerah: air, jalan lokal, sekolah, kesehatan, sampah, dan perizinan. Karena itu, Indonesia 2045 sangat bergantung pada kapasitas daerah.

Transfer fiskal perlu dihubungkan dengan kebutuhan dan outcome. Daerah dengan kapasitas lemah memerlukan technical assistance, bukan hanya dana tambahan. Penggunaan data, e-procurement, dan benchmarking antarwilayah dapat mempercepat pembelajaran.

Desentralisasi juga memberikan ruang eksperimen. Kebijakan lokal yang berhasil dapat direplikasi setelah dievaluasi secara sistematis.

49.13. Pembangunan Papua, Maluku, dan Wilayah Timur

Pemerataan wilayah tidak cukup hanya dengan transfer anggaran. Wilayah timur memiliki karakter geografis, sosial, dan logistik yang berbeda. Strategi perlu berbasis tempat atau place-based development.

Investasi konektivitas, pendidikan, kesehatan, energi, dan internet merupakan fondasi. Namun aktivitas ekonomi perlu disesuaikan dengan potensi seperti perikanan, agroforestry, pariwisata, jasa lingkungan, dan industri berbasis sumber daya yang dikelola berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat adat dan perlindungan hak atas tanah penting agar pembangunan tidak menimbulkan konflik. Kemakmuran harus dinikmati masyarakat lokal, bukan hanya tercatat sebagai PDRB.

49.14. Pembangunan Jawa setelah Aglomerasi

Jawa tetap menjadi pusat ekonomi karena konsentrasi penduduk, industri, universitas, dan infrastruktur. Tantangannya adalah mengelola congestion cost dan environmental pressure.

Strategi Jawa 2045 perlu beralih dari ekspansi horizontal menuju densifikasi yang efisien, transportasi massal, redevelopment kawasan, pengelolaan air, dan industri berbasis pengetahuan. Kota-kota perlu terhubung sebagai jaringan ekonomi, bukan bersaing secara terpisah.

Peningkatan produktivitas Jawa juga penting bagi pemerataan nasional karena surplus fiskal, pengetahuan, dan investasi dapat mendukung wilayah lain.

49.15. Kalimantan, IKN, dan Pola Pertumbuhan Baru

Pembangunan IKN berpotensi mengubah geografi ekonomi jika mampu menciptakan ekosistem baru, bukan hanya memindahkan administrasi. Konektivitas, universitas, layanan, industri hijau, dan inovasi menjadi penting agar kawasan memiliki basis ekonomi yang berkelanjutan.

Kalimantan juga memiliki sumber daya besar, tetapi perlu mengurangi ketergantungan ekstraktif. Hilirisasi, energi terbarukan, forest economy, dan jasa lingkungan dapat memperluas basis.

Perencanaan harus menjaga biodiversitas dan kawasan hutan. Pembangunan kota baru memberikan kesempatan menerapkan desain rendah karbon sejak awal.

49.16. Sulawesi dan Koridor Industri Timur

Sulawesi berkembang melalui pertambangan, industri pengolahan, pertanian, perikanan, dan perdagangan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan linkage lokal dan mengurangi enclave economy.

Industri mineral perlu mendorong pemasok engineering, maintenance, logistik, dan jasa profesional. Pendidikan vokasi lokal harus terhubung dengan kebutuhan tersebut.

Selain itu, kakao, kelapa, perikanan, dan pariwisata dapat dikembangkan agar struktur ekonomi lebih terdiversifikasi.

49.17. Sumatra sebagai Koridor Pangan, Energi, dan Industri

Sumatra memiliki basis perkebunan, energi, manufaktur, pelabuhan, dan kedekatan dengan pasar Asia. Infrastruktur lintas Sumatra dapat memperkuat integrasi, tetapi manfaatnya tergantung pengembangan kawasan produktif.

Agroindustry dapat meningkatkan nilai tambah kelapa sawit, karet, kopi, dan komoditas lain. Circular economy dapat memanfaatkan limbah biomassa sebagai energi dan bahan baku.

Perlindungan gambut, hutan, dan DAS penting karena kerusakan ekologis menciptakan risiko kebakaran dan kesehatan yang besar.

49.18. Kepulauan Kecil dan Ekonomi Berbasis Resiliensi

Pulau kecil menghadapi biaya logistik tinggi, keterbatasan air, dan kerentanan iklim. Model pembangunan tidak dapat meniru pulau besar. Energi terdesentralisasi, desalination tertentu, ekonomi biru, wisata berkualitas, dan konektivitas digital dapat menjadi bagian solusi.

Skala kecil juga memungkinkan circular systems yang terintegrasi. Pengelolaan sampah, energi, dan air dapat dirancang pada tingkat pulau.

Namun daya dukung lingkungan perlu menjadi batas keras. Pariwisata yang terlalu besar dapat merusak sumber daya yang menjadi daya tarik utama.

49.19. Ketahanan Air sebagai Agenda 2045

Air sering berada di belakang agenda pangan dan energi, padahal keduanya bergantung pada air. Urbanisasi, industri, pertanian, dan perubahan iklim akan meningkatkan tekanan.

Integrated water resources management memerlukan koordinasi hulu-hilir. Perlindungan DAS, efisiensi irigasi, pengendalian groundwater extraction, dan wastewater treatment perlu diperkuat.

Ketersediaan air juga menentukan lokasi investasi. Perencanaan industri harus mempertimbangkan water carrying capacity agar tidak menciptakan konflik dengan rumah tangga dan pertanian.

49.20. Circular Economy dan Efisiensi Material

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan konsumsi material. Jika model linear take-make-dispose dipertahankan, kebutuhan sumber daya dan sampah meningkat. Circular economy berupaya mempertahankan nilai material selama mungkin.

Extended producer responsibility, desain produk, repair, remanufacturing, dan recycling dapat menciptakan industri baru. Informal waste workers perlu diintegrasikan secara adil dalam sistem formal.

Efisiensi material juga mengurangi ketergantungan impor dan emisi. Dalam industri baterai, misalnya, recycling dapat menjadi sumber mineral sekunder strategis.

49.21. Ekonomi Perawatan dan Care Infrastructure

Ketika partisipasi perempuan meningkat dan masyarakat menua, kebutuhan childcare dan eldercare akan meningkat. Care economy bukan hanya urusan keluarga, tetapi infrastruktur sosial yang menentukan partisipasi tenaga kerja.

Investasi childcare berkualitas memungkinkan orang tua bekerja dan meningkatkan perkembangan anak. Sistem eldercare mengurangi beban caregiver serta meningkatkan martabat lansia.

Pekerjaan care juga dapat menjadi sumber pekerjaan besar, tetapi kualitas dan upahnya perlu dijaga. Kemakmuran 2045 harus mengakui nilai pekerjaan perawatan.

49.22. Migrasi, Diaspora, dan Sirkulasi Talenta

Mobilitas manusia dapat meningkatkan produktivitas ketika pekerja berpindah ke tempat yang lebih sesuai keterampilannya. Urbanisasi dan migrasi internasional adalah bagian transformasi.

Indonesia juga dapat memanfaatkan diaspora sebagai sumber jaringan, teknologi, investasi, dan mentoring. Kebijakan tidak harus selalu mengembalikan diaspora secara permanen; sirkulasi talenta dapat sama berharganya.

Perlindungan pekerja migran tetap penting agar mobilitas menghasilkan peningkatan kesejahteraan, bukan eksploitasi.

49.23. Ekonomi Informal dan Jalan Menuju Formalitas

Informalitas memberikan fleksibilitas tetapi sering terkait produktivitas rendah dan perlindungan terbatas. Formalisasi tidak dapat dipaksakan hanya melalui penegakan; usaha perlu melihat manfaat.

Simplifikasi izin, pajak yang proporsional, akses kredit, perlindungan sosial, dan peluang pengadaan dapat menciptakan incentive to formalize. Digital payments membantu pencatatan transaksi.

Tujuan formalitas adalah meningkatkan produktivitas dan keamanan, bukan sekadar menambah administrasi.

49.24. Keamanan Siber sebagai Infrastruktur Nasional

Semakin digital ekonomi, semakin besar dampak serangan siber. Sistem pembayaran, rumah sakit, energi, transportasi, dan pemerintahan merupakan critical infrastructure.

Indonesia perlu mengembangkan standar, incident-response capability, cyber talent, dan koordinasi publik-swasta. Security-by-design harus menjadi bagian pengadaan.

Keamanan siber yang kuat meningkatkan trust dan mengurangi economic loss. Ia merupakan infrastruktur sama pentingnya dengan jaringan fisik.

49.25. Kecerdasan Buatan dan Tata Kelola Keputusan

AI akan semakin banyak digunakan dalam kredit, rekrutmen, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Keputusan tersebut dapat memengaruhi hak individu.

Governance perlu memastikan kualitas data, audit bias, explainability sesuai risiko, dan human appeal. Tidak semua sistem membutuhkan regulasi sama; pendekatan risk-based lebih proporsional.

Responsible AI bukan penghambat inovasi. Ia menjaga legitimasi penggunaan teknologi dan mengurangi risiko litigasi serta kerugian reputasi.

49.26. Mengukur Kemakmuran di Luar PDB

PDB penting karena mengukur aktivitas ekonomi, tetapi tidak menangkap distribusi, pekerjaan rumah tangga, kualitas lingkungan, atau keamanan. Negara dapat mencatat pertumbuhan tinggi sementara masyarakat menghadapi polusi, waktu perjalanan panjang, atau ketidakpastian kerja.

Dashboard 2045 perlu menggabungkan PDB dengan median income, healthy life expectancy, learning outcomes, household assets, housing affordability, air quality, trust, dan natural capital.

Pendekatan multidimensi tidak berarti mengabaikan pertumbuhan. Justru ia membantu memastikan pertumbuhan diterjemahkan menjadi kehidupan yang lebih baik.

49.27. Intergenerational Equity

Pembangunan 2045 harus memperhitungkan generasi yang belum memiliki suara politik hari ini. Utang, kerusakan alam, dan kualitas pendidikan merupakan bentuk transfer antargenerasi.

Utang yang membiayai aset produktif dapat adil karena generasi masa depan ikut menikmati manfaat. Sebaliknya, kerusakan lingkungan atau utang untuk konsumsi yang tidak produktif memindahkan beban.

Intergenerational budgeting dapat membantu pemerintah menilai dampak jangka panjang. Prinsipnya sederhana: generasi sekarang tidak boleh meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi pilihan generasi berikutnya.

49.28. Skenario Indonesia 2045: Akselerasi Inklusif

Dalam skenario akselerasi inklusif, reformasi produktivitas berjalan konsisten. Investasi meningkat, perusahaan naik kelas, pendidikan membaik, dan teknologi menyebar. Pertumbuhan menjadi lebih tinggi sekaligus menciptakan pekerjaan kelas menengah.

Penerimaan pajak meningkat seiring formalitas dan pendapatan, memungkinkan negara memperbaiki layanan. Energi menjadi lebih bersih, kota lebih terhubung, dan modal alam dikelola sebagai aset.

Dalam skenario ini, Indonesia mencapai status negara berpendapatan tinggi tanpa kehilangan kohesi sosial dan daya dukung ekologis. Ini adalah skenario yang paling dekat dengan makna kemakmuran berkelanjutan.

49.29. Skenario Indonesia 2045: Pertumbuhan Tanpa Transformasi

Skenario kedua adalah pertumbuhan yang tetap sekitar tren lama. Stabilitas terjaga tetapi produktivitas tidak meningkat cukup cepat. Pekerjaan banyak tercipta di sektor bernilai tambah rendah, sementara inovasi dan investasi berkualitas terbatas.

Pendapatan meningkat, tetapi jarak dengan negara maju tetap besar. Kelas menengah tumbuh lambat dan kerentanan rumah tangga tetap tinggi.

Skenario ini menunjukkan bahwa stabilitas merupakan necessary condition, bukan sufficient condition. Tanpa transformasi, target 2045 dapat menjauh meskipun tidak terjadi krisis besar.

49.30. Skenario Indonesia 2045: Fragmentasi dan Guncangan

Skenario ketiga muncul jika geopolitik, iklim, dan konflik domestik berinteraksi dengan kelemahan institusi. Perdagangan terganggu, biaya energi naik, bencana meningkat, dan kebijakan menjadi tidak konsisten.

Investasi menurun karena uncertainty. Fiskal tertekan oleh subsidi dan respons bencana. Reformasi jangka panjang tertunda karena fokus pada krisis berulang.

Resiliensi kebijakan penting untuk mencegah skenario ini. Diversifikasi, cadangan fiskal, institusi kuat, dan sistem sosial adaptif mengurangi kemungkinan shock menjadi krisis pembangunan.

49.31. Strategi Pembiayaan Pembangunan Jangka Panjang

Kemakmuran 2045 membutuhkan pembiayaan yang sabar, stabil, dan sesuai dengan karakter proyek. Infrastruktur, pendidikan, teknologi, dan transisi energi tidak selalu menghasilkan return dalam waktu singkat. Karena itu, Indonesia perlu memperdalam sumber pembiayaan jangka panjang dari dana pensiun, asuransi, pasar obligasi, sovereign instruments, dan blended finance.

Pembiayaan pembangunan tidak boleh terlalu bergantung pada satu sumber. Ketergantungan pada perbankan jangka pendek menciptakan maturity mismatch ketika membiayai proyek panjang. Pasar modal yang dalam membantu mendistribusikan risiko dan menyediakan pilihan instrumen.

Blended finance dapat digunakan untuk proyek yang mempunyai manfaat sosial besar tetapi return finansial belum menarik bagi investor swasta. Namun subsidi risiko harus transparan dan memiliki additionality. Negara tidak seharusnya menanggung risiko yang sebenarnya dapat ditanggung investor komersial.

Kualitas pipeline proyek juga menentukan. Investor tidak akan datang hanya karena dana tersedia. Studi kelayakan, kepastian lahan, struktur kontrak, dan governance harus memadai. Karena itu, project preparation facility merupakan bagian penting dari arsitektur pembiayaan.

49.32. Reformasi Pajak untuk Negara Maju

Negara berpendapatan tinggi umumnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk menyediakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Indonesia menuju 2045 perlu memperkuat tax capacity secara bertahap tanpa merusak daya saing.

Reformasi dapat berfokus pada perluasan basis, kepatuhan, digitalisasi, pengurangan pengecualian yang tidak efektif, dan perbaikan administrasi. Pajak properti, penghasilan, konsumsi, dan instrumen lingkungan memiliki fungsi berbeda sehingga kombinasi harus dirancang secara seimbang.

Legitimasi pajak sangat tergantung kualitas layanan dan trust. Warga lebih bersedia patuh ketika melihat proses yang adil, pelayanan sederhana, dan penggunaan anggaran yang transparan. Karena itu, reformasi penerimaan dan reformasi belanja harus berjalan bersama.

Tax policy juga perlu memperhatikan perubahan ekonomi digital dan mobilitas modal. Kerja sama internasional menjadi semakin penting untuk mengurangi base erosion dan memastikan perusahaan digital berkontribusi secara wajar.

49.33. Reformasi Subsidi dan Harga yang Mencerminkan Biaya

Subsidi sering diperlukan untuk melindungi rumah tangga, tetapi desain yang terlalu luas dapat menghabiskan ruang fiskal dan memberi manfaat lebih besar kepada konsumen kaya. Reformasi subsidi adalah salah satu sumber potensial pembiayaan pembangunan.

Perubahan harus dilakukan bertahap, berbasis data, dan disertai kompensasi kepada kelompok rentan. Harga energi yang lebih mencerminkan biaya dapat mendorong efisiensi dan investasi energi bersih. Namun shock harga mendadak dapat memicu inflasi dan penolakan sosial.

Komunikasi kebijakan penting. Masyarakat perlu memahami ke mana penghematan dialihkan, misalnya untuk transportasi publik, bantuan tunai, pendidikan, atau kesehatan. Reformasi yang menghasilkan visible social dividend memiliki legitimasi lebih besar.

Pada akhirnya, subsidi sebaiknya diarahkan pada manusia atau tujuan strategis, bukan dipertahankan tanpa evaluasi pada komoditas.

49.34. Procurement sebagai Instrumen Transformasi

Belanja pemerintah merupakan pasar besar yang dapat digunakan untuk mendorong kualitas, inovasi, dan pengembangan pemasok. Procurement tidak harus selalu memilih harga terendah jika total cost dan quality lebih penting.

Pemerintah dapat menggunakan standard kinerja, environmental criteria, dan innovation procurement. UMKM dapat diberi akses melalui paket yang proporsional dan platform yang transparan, tetapi kualitas tetap harus dijaga.

Procurement juga dapat menjadi sarana difusi teknologi. Rumah sakit publik dapat membuka ruang pilot alat kesehatan domestik yang memenuhi standard. Pemerintah daerah dapat menguji solusi smart city melalui challenge-based procurement.

Risiko korupsi tetap besar sehingga transparansi, open contracting, conflict-of-interest control, dan audit berbasis data perlu diperkuat.

49.35. Data, Statistik, dan Evidence-Based Policy

Perjalanan dua puluh tahun tidak dapat dikelola tanpa data yang baik. Statistik resmi perlu cepat, akurat, granular, dan interoperabel. Data administratif dapat melengkapi survei, tetapi kualitas dan governance harus dijaga.

Evidence-based policy bukan berarti keputusan hanya diserahkan kepada teknokrat. Nilai dan prioritas tetap bersifat politik. Namun bukti membantu menjelaskan trade-off, memperkirakan dampak, dan mengurangi keputusan berdasarkan intuisi semata.

Eksperimen kebijakan, randomized evaluation pada program tertentu, natural experiment, dan analisis big data dapat memperkaya pembelajaran. Yang penting adalah adanya feedback loop: hasil evaluasi harus memengaruhi desain berikutnya.

Indonesia 2045 memerlukan learning state, yaitu negara yang mampu belajar lebih cepat daripada perubahan masalah.

49.36. Reformasi Birokrasi dari Compliance ke Performance

Birokrasi tradisional sering menekankan kepatuhan prosedural. Kepatuhan tetap penting, tetapi negara maju juga memerlukan orientasi outcome. Pegawai perlu diberi ruang menyelesaikan masalah selama akuntabilitas jelas.

Performance management harus menghindari terlalu banyak KPI yang mendorong gaming. Beberapa indikator outcome yang bermakna lebih baik daripada ratusan indikator aktivitas. Leadership review dan peer learning dapat memperbaiki implementasi.

Karier aparatur perlu berbasis merit dan kompetensi. Talenta digital, ekonomi, engineering, kesehatan, dan lingkungan perlu dapat berkembang dalam sektor publik tanpa harus meninggalkan bidang keahlian.

Transformasi birokrasi juga memerlukan simplifikasi organisasi. Struktur yang terlalu banyak lapisan memperlambat koordinasi dan keputusan.

49.37. Kualitas Hukum dan Kepastian Kontrak

Investasi jangka panjang bergantung pada kepastian hukum. Perusahaan perlu mengetahui bahwa kontrak ditegakkan, izin tidak berubah secara sewenang-wenang, dan sengketa dapat diselesaikan secara cepat dan adil.

Reformasi peradilan ekonomi, arbitrase, administrasi pertanahan, dan perizinan mempunyai dampak langsung pada biaya modal. Ketidakpastian meningkatkan risk premium bahkan ketika tarif pajak rendah.

Kualitas hukum juga melindungi masyarakat dari kekuatan ekonomi berlebihan. Hak konsumen, pekerja, pemilik tanah, dan pemegang saham minoritas perlu ditegakkan.

Rule of law dengan demikian merupakan infrastruktur ekonomi yang tidak terlihat tetapi sangat menentukan produktivitas.

49.38. Kewirausahaan Sosial dan Inovasi Komunitas

Tidak semua masalah sosial dapat diselesaikan pemerintah atau perusahaan komersial murni. Social enterprise dapat menggabungkan tujuan sosial dengan disiplin bisnis pada bidang pendidikan, sampah, kesehatan, pertanian, dan inklusi keuangan.

Kebijakan dapat menyediakan legal framework, impact investment, procurement, dan measurement standard. Namun social enterprise tetap perlu berkelanjutan secara finansial agar dampaknya tidak berhenti ketika grant selesai.

Komunitas juga sering menghasilkan inovasi sederhana yang sesuai konteks lokal. Pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk mengenali, menguji, dan memperluas inovasi tersebut.

Kemakmuran berkelanjutan akan lebih kuat jika inovasi tidak hanya datang dari pusat atau korporasi besar, tetapi juga dari masyarakat.

49.39. Pariwisata Berkualitas dan Ekonomi Pengalaman

Indonesia memiliki keunggulan alam dan budaya yang besar. Namun strategi pariwisata 2045 perlu bergeser dari jumlah kunjungan semata menuju value per visitor, kualitas pekerjaan, dan daya dukung lingkungan.

Destinasi memerlukan manajemen carrying capacity, sampah, air, transportasi, dan pelestarian budaya. Over-tourism dapat menurunkan kualitas hidup warga dan merusak aset wisata.

UMKM lokal perlu terhubung dengan hotel, restoran, transportasi, dan creative economy agar multiplier tinggal di daerah. Sertifikasi, digital marketing, dan kualitas layanan dapat meningkatkan nilai.

Pariwisata berkualitas juga lebih resilien karena tidak terlalu tergantung pada volume besar dengan margin rendah.

49.40. Ekonomi Kreatif, Budaya, dan Intellectual Property

Kemakmuran masa depan semakin bergantung pada aset tidak berwujud. Musik, film, desain, game, animasi, kuliner, fashion, dan konten digital dapat menciptakan nilai tinggi dengan penggunaan material relatif kecil.

Indonesia memiliki keragaman budaya yang menjadi sumber diferensiasi. Namun nilai ekonomi akan hilang jika intellectual property lemah atau pencipta tidak memiliki kemampuan bisnis.

Pendidikan kreatif, platform distribusi, pembiayaan, hak cipta, dan ekspor jasa perlu diperkuat. Kolaborasi antara teknologi dan budaya dapat menghasilkan produk global yang tetap memiliki identitas Indonesia.

Ekonomi kreatif juga menyediakan jalur pekerjaan bagi generasi muda di luar sektor tradisional.

49.41. Diplomasi Ekonomi untuk Indonesia Emas

Ekonomi domestik dan kebijakan luar negeri semakin terhubung. Diplomasi ekonomi dapat membantu membuka pasar, menarik investasi, memperoleh teknologi, dan membangun standard bersama.

Indonesia perlu menggunakan posisi di ASEAN, G20, dan berbagai forum untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang pada perdagangan digital, pembiayaan iklim, energi, dan kesehatan.

Perjanjian ekonomi harus dievaluasi berdasarkan dampaknya pada upgrading domestik, bukan hanya volume perdagangan. Market access akan lebih bermanfaat jika perusahaan Indonesia memiliki kemampuan memanfaatkannya.

Diplomasi ekonomi yang efektif membutuhkan koordinasi antara kementerian luar negeri, ekonomi, industri, perdagangan, investasi, dan dunia usaha.

49.42. Ketahanan Pangan Perkotaan dan Sistem Logistik

Urbanisasi meningkatkan jarak antara produsen dan konsumen. Kota besar membutuhkan sistem pangan yang efisien agar harga terjangkau dan pasokan stabil.

Cold chain, wholesale market, transportasi, storage, dan informasi harga dapat mengurangi kehilangan serta volatilitas. Urban planning juga perlu melindungi jalur distribusi dan pasar.

Diversifikasi sumber pangan mengurangi risiko. Ketergantungan pada satu wilayah atau satu komoditas membuat sistem rentan terhadap cuaca dan gangguan logistik.

Food resilience harus menjadi bagian dari perencanaan kota, bukan hanya kebijakan pertanian.

49.43. Ketahanan Kesehatan dan Pandemi

Pandemi menunjukkan bahwa kesehatan publik adalah isu ekonomi dan keamanan nasional. Indonesia 2045 perlu memiliki surveillance, laboratorium, stockpile, produksi farmasi tertentu, dan koordinasi darurat yang kuat.

Investasi kesiapsiagaan sering terlihat mahal ketika tidak ada krisis, tetapi biaya pandemi jauh lebih besar. Karena itu, preparedness harus dipandang sebagai insurance.

Riset vaksin, diagnostik, dan penyakit tropis juga dapat menjadi basis industri kesehatan. Kolaborasi universitas, rumah sakit, perusahaan, dan pemerintah penting.

Sistem kesehatan yang tangguh melindungi kehidupan sekaligus mengurangi volatilitas ekonomi.

49.44. Strategi Antisipasi Penuaan Penduduk

Menjelang 2045, struktur usia Indonesia akan bergerak menuju populasi yang lebih tua. Penuaan bukan krisis jika produktivitas dan sistem sosial disiapkan sejak awal.

Usia pensiun, tabungan, preventive health, lifelong learning, dan desain pekerjaan fleksibel perlu dibicarakan. Pekerja senior dapat tetap produktif bila kesehatan dan keterampilan dijaga.

Teknologi assistive, telehealth, dan smart home dapat meningkatkan kemandirian lansia. Care economy juga akan berkembang.

Persiapan sekarang menghindari situasi ketika generasi produktif di masa depan harus menanggung beban yang terlalu besar.

49.45. Human Flourishing sebagai Tujuan Akhir

Pada akhirnya, pembangunan ekonomi merupakan sarana bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Kemakmuran berkelanjutan seharusnya memperbesar kemampuan masyarakat untuk sehat, belajar, bekerja bermakna, membangun keluarga, berkreasi, berpartisipasi, dan hidup dalam lingkungan yang aman.

Perspektif human flourishing mencegah kebijakan terjebak pada angka agregat. Dua negara dengan pendapatan sama dapat memiliki kualitas hidup berbeda karena kesehatan, pendidikan, ketimpangan, trust, keamanan, dan lingkungan.

Indonesia 2045 perlu menempatkan manusia sebagai tujuan dan teknologi, modal, serta kebijakan sebagai alat. Dengan perspektif ini, sukses bukan hanya menjadi negara berpendapatan tinggi, melainkan menjadi masyarakat yang mampu memberi kesempatan luas bagi setiap orang untuk berkembang.

Itulah substansi Indonesia Emas: kemajuan ekonomi yang membentuk kehidupan yang lebih bermartabat sekaligus dapat dipertahankan lintas generasi.

50. Kesimpulan

Indonesia 2045 adalah proyek transformasi nasional yang skalanya jauh melampaui pemulihan ekonomi. Pemulihan memberikan stabilitas dan ruang bernapas, tetapi kemakmuran memerlukan

produktivitas, pekerjaan berkualitas, modal manusia, inovasi, investasi, dan institusi yang efektif. Keberlanjutan menambahkan dimensi penting: pertumbuhan harus mempertahankan modal alam dan kemampuan generasi masa depan.

Landasan formal melalui RPJPN 2025-2045 memberikan arah, tetapi keberhasilan ditentukan implementasi. World Bank mengingatkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan besar, namun pertumbuhan perlu menjadi lebih produktif dan job-rich untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Artinya, kualitas transformasi lebih penting daripada sekadar kecepatan ekspansi.

Kemakmuran 2045 seharusnya terlihat dalam kehidupan nyata: pekerjaan yang memberi martabat, sekolah yang menghasilkan kemampuan, layanan kesehatan yang melindungi keluarga, kota dan desa yang produktif, lingkungan yang sehat, serta negara yang dipercaya. Jika stabilitas, produktivitas, pemerataan, resiliensi, dan keberlanjutan dapat bergerak bersama, Indonesia tidak hanya akan menjadi ekonomi yang lebih besar, tetapi masyarakat yang lebih maju, adil, dan mampu mempertahankan kemakmurannya untuk generasi berikutnya.

Rekomendasi Strategis

- Menjadikan produktivitas dan kualitas pekerjaan sebagai indikator utama akselerasi menuju negara berpendapatan tinggi, bukan hanya pertumbuhan PDB.
- Melindungi investasi modal manusia—pendidikan, kesehatan, gizi, dan pembelajaran sepanjang hayat—dari tekanan fiskal jangka pendek.
- Melaksanakan reformasi regulasi dan persaingan yang menurunkan hambatan masuk, meningkatkan kepastian usaha, dan mempercepat difusi teknologi.
- Memperdalam industrialisasi dari hilirisasi berbasis sumber daya menuju manufaktur kompleks, engineering, inovasi, dan supplier development.
- Memperkuat UMKM dan koperasi sebagai bagian rantai nilai produktif melalui teknologi, pembiayaan, standardisasi, logistik, dan manajemen.
- Menjadikan transformasi digital dan AI sebagai strategi augmentation manusia, disertai reskilling, data governance, cybersecurity, dan responsible AI.
- Mengintegrasikan agenda pangan, energi, air, iklim, ekonomi hijau, dan ekonomi biru ke dalam strategi ketahanan nasional.
- Memperkuat penerimaan negara dan kualitas belanja untuk menciptakan ruang fiskal yang sehat bagi investasi jangka panjang.
- Memobilisasi modal swasta melalui pasar keuangan yang lebih dalam, PPP transparan, pembiayaan hijau, dan iklim investasi yang dapat diprediksi.
- Memperkuat pusat pertumbuhan di luar Jawa melalui konektivitas Nusantara, kota sekunder, desa produktif, dan transfer fiskal berbasis outcome.

- Membangun sistem perlindungan sosial yang adaptif dan portable untuk mendukung mobilitas pekerja serta transisi teknologi.
- Menetapkan Sustainable Prosperity Scorecard sebagai pelengkap indikator PDB agar kemajuan ekonomi, sosial, kelembagaan, dan ekologis dibaca secara terpadu.
- Memperkuat monitoring RPJPN lintas pemerintahan melalui target antara, evaluasi independen, dan mekanisme koreksi berbasis bukti.
- Menjadikan perguruan tinggi dan pusat riset sebagai infrastruktur inovasi nasional melalui kolaborasi industri dan mission-oriented research.
- Menempatkan integritas, transparansi, dan meritokrasi sebagai fondasi eksekusi kebijakan 2045.

Glossarium

Adaptive Social Protection: Sistem perlindungan sosial yang dapat memperluas cakupan atau manfaat dengan cepat ketika terjadi guncangan.

Artificial Intelligence (AI): Sistem komputasi yang melakukan tugas seperti prediksi, pengenalan pola, generasi konten, dan dukungan keputusan.

Blue Economy: Pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan dan kesejahteraan dengan menjaga kesehatan ekosistem.

Build Back Better: Prinsip pemulihan yang tidak sekadar mengembalikan kondisi lama, tetapi membangun sistem yang lebih tangguh dan baik.

Circular Economy: Model produksi dan konsumsi yang mengurangi limbah melalui penggunaan kembali, perbaikan, daur ulang, dan desain sirkular.

Decent Work: Pekerjaan produktif dengan pendapatan layak, hak, perlindungan, dan martabat.

Digital Transformation: Perubahan sistem, model bisnis, dan proses melalui integrasi teknologi digital.

Economic Complexity: Tingkat keragaman dan kecanggihan kemampuan produktif yang tercermin pada produk atau jasa suatu ekonomi.

Fiscal Space: Kemampuan pemerintah meningkatkan belanja atau mengurangi pajak tanpa mengancam keberlanjutan fiskal.

Green Economy: Ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan sambil mengurangi risiko lingkungan dan tekanan ekologis.

High-Income Country: Kategori negara berdasarkan pendapatan per kapita yang melampaui ambang klasifikasi internasional tertentu.

Hilirisasi: Proses meningkatkan pengolahan sumber daya ke tahap produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Human Capital: Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas produktif manusia.

Industrial Policy: Kebijakan yang secara sengaja mendorong pengembangan sektor atau kemampuan produktif tertentu.

Just Transition: Transisi ekonomi rendah karbon yang melindungi pekerja, komunitas, dan kelompok rentan.

Middle-Income Trap: Situasi ketika negara sulit bergerak dari pendapatan menengah menuju pendapatan tinggi karena produktivitas dan inovasi stagnan.

Natural Capital: Aset alam seperti hutan, tanah, air, biodiversitas, dan ekosistem yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.

Planetary Boundaries: Kerangka batas ekologis yang menunjukkan ruang aman bagi aktivitas manusia pada sistem bumi.

Productivity: Jumlah nilai atau output yang dihasilkan dari input tenaga kerja, modal, waktu, atau sumber daya.

Public Investment Management: Tata kelola investasi publik dari perencanaan hingga evaluasi dan pemeliharaan.

Resilience: Kemampuan menyerap guncangan, menyesuaikan diri, dan pulih tanpa kehilangan fungsi utama.

RPJPN: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Structural Transformation: Perubahan struktur ekonomi menuju sektor dan aktivitas dengan produktivitas serta nilai tambah lebih tinggi.

Sustainable Prosperity: Kemakmuran yang meningkatkan kesejahteraan kini tanpa merusak kemampuan generasi masa depan memperoleh kesejahteraan.

Total Factor Productivity: Bagian pertumbuhan output yang berasal dari efisiensi, teknologi, organisasi, dan faktor selain tambahan modal serta tenaga kerja.

Value Added: Nilai ekonomi yang ditambahkan suatu proses produksi terhadap input yang digunakan.

Daftar Pustaka

Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30.

<https://doi.org/10.1257/jep.33.2.3>

Auerbach, A. J., & Gorodnichenko, Y. (2012). Measuring the output responses to fiscal policy.

American Economic Journal: Economic Policy, 4(2), 1-27. <https://doi.org/10.1257/pol.4.2.1>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

- Dabla-Norris, E., Brumby, J., Kyobe, A., Mills, Z., & Papageorgiou, C. (2012). Investing in public investment: An index of public investment efficiency. *Journal of Economic Growth*, 17, 235-266. <https://doi.org/10.1007/s10887-012-9078-5>
- Goldfarb, A., & Tucker, C. (2019). Digital economics. *Journal of Economic Literature*, 57(1), 3-43. <https://doi.org/10.1257/jel.20171452>
- International Labour Organization. (2024). World Social Protection Report 2024-26: Universal social protection for climate action and a just transition. ILO.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2024). RPJPN 2025-2045 dan Visi Indonesia Emas 2045. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *Research Policy*, 48(8), 103773. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.03.018>
- OECD. (2021). The digital transformation of SMEs. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>
- OECD. (2023). Government at a Glance 2023. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/3d5c5d31-en>
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin, F. S., III, Lambin, E. F., et al. (2009). A safe operating space for humanity. *Nature*, 461, 472-475. <https://doi.org/10.1038/461472a>
- Rodrik, D. (2008). Second-best institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100-104. <https://doi.org/10.1257/aer.98.2.100>
- Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.
- Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889-901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- World Bank. (2025). Indonesia Growth and Jobs Report: Running Faster, for Longer - Structural Transformation, Productivity, and Good Jobs. World Bank.
- World Bank. (2026, July 9). Indonesia and the World Bank Group strengthen partnership to create better jobs and accelerate progress toward Golden Indonesia 2045.
- World Bank. (2025, June 16). World Bank approves investments to boost Indonesia's economic growth and access to clean energy.